

MENCEGAH PILKADA CALON TUNGGAL: MANUVER POLITIK PDI PERJUANGAN PADA PILKADA KABUPATEN BOGOR 2024

Muhamad Jafier Viola Rajabani¹, Ratnia Solihah²

^{1,2}Universitas Padjadjaran, Bandung, Indonesia

Email: muhamad22009@mail.unpad.ac.id

Abstrak

Penelitian ini menganalisis rasionalitas manuver politik PDI Perjuangan sebagai penantang tunggal melawan hegemoni koalisi raksasa 17 partai pada Pilkada Kabupaten Bogor 2024. Melalui metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus intrinsik, pengumpulan data dilakukan menggunakan analisis dokumen serta wawancara mendalam bersama informan kunci, Bayu Syahjohan. Studi ini memadukan konsep poliarki Robert A. Dahl dan teori koalisi rasional William H. Riker untuk membedah anomali elektoral tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keputusan maju sendirian dengan probabilitas kekalahan tinggi bukanlah tindakan irasional, melainkan strategi jangka panjang (long game) guna mengakuisisi kompensasi strategis (side-payments). Dalam perspektif Dahl, manuver ini secara de facto mencegah fenomena calon tunggal dan menyelamatkan pilar kontestasi publik. Melalui kaca mata Riker, kekalahan elektoral tersebut dikalkulasi demi empat payoff fundamental: (1) modal simbolik sebagai penjaga demokrasi, (2) konsolidasi aliansi oposisi yang sukses menarik faksi non-parlemen, (3) akuisisi 599.453 suara murni (27,77%) sebagai investasi politik menuju 2029, dan (4) pemetaan faktual atas ekosistem pragmatisme (high-cost politics) di akar rumput. Penelitian ini berkontribusi menjembatani dikotomi antara analisis normatif dan kalkulasi rasional dalam menjelaskan dinamika oposisi di tengah kuatnya arus kartelisasi politik lokal.

Kata Kunci: Pilkada Kabupaten Bogor 2024, Pilkada Calon Tunggal, PDI Perjuangan Kabupaten Bogor, Koalisi Politik, Demokrasi Lokal.

Abstract

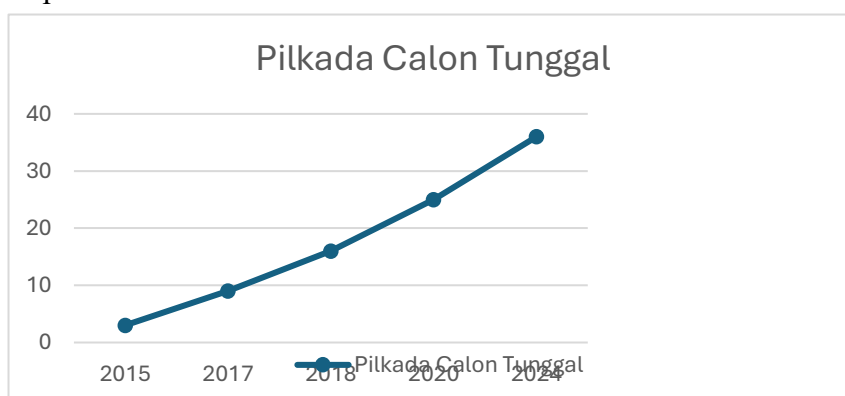
This study analyzes the political rationality of PDI Perjuangan's maneuver as the sole challenger against a massive 17-party coalition hegemony in the 2024 Bogor Regency Regional Election. Employing a qualitative intrinsic case study approach, data were gathered through document analysis and in-depth interviews with a key informant, Bayu Syahjohan. This research integrates Robert A. Dahl's polyarchy concept and William H. Riker's rational coalition theory to dissect this electoral anomaly. The findings reveal that the decision to run independently, despite a high probability of defeat, was not an irrational act but a calculated long-term strategy (long game) to acquire strategic side-payments. From Dahl's perspective, this maneuver de facto prevented a single-candidate phenomenon and safeguarded the pillar of public contestation. Through Riker's lens, the electoral defeat was calculated for four fundamental payoffs: (1) symbolic capital as the guardian of democracy, (2) consolidation of opposition alliances that successfully attracted non-parliamentary factions, (3) the acquisition of 599,453 pure votes (27.77%) as a political investment toward 2029, and (4) factual mapping of the grassroots pragmatism ecosystem (high-cost politics). This study contributes to bridging the dichotomy between normative analysis and rational calculation in explaining opposition dynamics amidst local political cartelization.

Keywords: Bogor Regency Pilkada 2024, Single Candidate Pilkada, PDI Perjuangan Bogor Regency, Political Coalition, Local Democracy.

A. PENDAHULUAN

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) adalah satu dari sekian banyak bentuk pemilu yang menghendaki rakyat untuk memilih pemimpin yang akan memengaruhi arah kebijakan suatu daerah. Pelaksanaan Pilkada langsung di Indonesia juga merupakan salah satu bentuk implementasi dari cita-cita reformasi yang berupaya memperbaiki kualitas demokrasi di Indonesia pasca-Orde Baru (Mz, 2014). Pada 27 November 2024 lalu, Indonesia kembali menggelar Pilkada serentak yang diselenggarakan di 545 daerah (37 provinsi, 415 kabupaten, dan 93 kota), menjadikannya momentum penting untuk memperkuat demokrasi lokal setelah kontestasi nasional sebelumnya (CNN Indonesia, 2024). Dalam pandangan Sarbaini (2015), pemilu merupakan medan pertempuran untuk memperebutkan posisi politik di pemerintahan melalui partisipasi warga negara yang memenuhi syarat. Dalam sistem demokrasi yang sehat, kontestasi seperti Pilkada idealnya menjadi arena pertarungan gagasan antar pasangan calon (paslon) agar masyarakat dapat membandingkan visi yang ditawarkan dan menentukan pilihan berdasarkan kualitas ide dan program kerja yang relevan bagi daerahnya.

Namun, dalam praktiknya, Pilkada 2024 juga diwarnai oleh beragam dinamika politik, seperti menguatnya politik dinasti, kemunculan figur-figur baru, hingga fenomena calon tunggal, yang menunjukkan bahwa idealisme demokrasi elektoral belum sepenuhnya tercapai. Dikutip dari Hamidah (2024), KPU RI mencatat bahwa terdapat 36 paslon yang melawan kotak kosong dan menjadi yang tertinggi dibandingkan dengan perhelatan Pilkada sebelumnya. Pragmatisme partai politik sebagai residu dari Pemilu 14 Februari 2024 lalu, dianggap menjadi salah satu faktor yang paling mempengaruhi fenomena calon tunggal ini (Muhid, 2024). Hal ini dibuktikan dengan tidak sedikit calon kepala dan wakil kepala daerah pada Pilkada kali ini yang diusung oleh koalisi gemuk di daerah tersebut (Faturahman, 2024). Kondisi semacam ini tak jarang membuat kontestasi kehilangan rival yang sepadan dan cenderung memperkuat pragmatisme partai politik untuk ikut masuk ke dalam poros politik yang lebih besar karena dianggap lebih aman dan menguntungkan. Secara hukum, hal ini diperbolehkan menurut Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-XIII/2015, namun secara substansi demokrasi, Pilkada calon tunggal mencederai prinsip dasar demokrasi elektoral yang memberikan ruang bagi masyarakat untuk memilih secara rasional dari beberapa alternatif pemimpin.



Bagan 1 Jumlah Pilkada Calon Tunggal 2015-2024

Sumber: Diolah dari data (KPU Kabupaten Bogor, 2018, 2024)

Kabupaten Bogor menjadi salah satu daerah yang sempat berada di ambang Pilkada calon tunggal. Menjelang penutupan pendaftaran oleh KPUD Kabupaten Bogor, hanya terdapat satu paslon yang mendaftar, yaitu Rudy Susmanto-Ade Ruhandi yang diusung oleh 17 partai politik (Setiawan, 2024). Ini menjadi kondisi yang mengkhawatirkan, mengingat kompleksitas

wilayah Kabupaten Bogor, baik dari segi luas geografis, heterogenitas sosial-politik, maupun jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang merupakan yang terbesar secara nasional, tetapi tidak sebanding dengan minimnya pilihan politik yang tersedia bagi pemilih. Kekhawatiran ini akhirnya mereda saat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (selanjutnya disebut PDI Perjuangan) mendaftarkan pasangan Bayu Syahjohan-Musyafaur Rahman, tepat di hari terakhir masa pendaftaran. Manuver tersebut menjadi penentu agar Pilkada Kabupaten Bogor tetap berlangsung dengan lebih dari satu paslon, meskipun aroma darurat politik dan keputusan *last-minute* begitu kental.

Langkah PDI Perjuangan tersebut kemudian diklaim sebagai “upaya penyelamatan demokrasi lokal” di Kabupaten Bogor. Dalam pernyataan resminya, Wakil Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Kabupaten, Adian Napitupulu, menyatakan bahwa partainya tidak ingin demokrasi di daerah sebesar dan sekompleks Kabupaten Bogor dicerai hanya karena tidak ada lawan tanding yang sepadan bagi kandidat koalisi besar (Antara, 2024). Pernyataan tersebut mungkin terdengar cukup heroik, tetapi mengundang beragam pertanyaan dan asumsi, seperti: apakah langkah PDI Perjuangan benar-benar dilandasi oleh komitmen ideologis terhadap demokrasi? Ataukah ini hanya strategi elektoral untuk tetap menjaga eksistensi partai dalam peta politik lokal? Mengingat PDI Perjuangan sendiri bukan merupakan kekuatan politik yang dominan di Kabupaten Bogor. Terlebih, lanskap politik nasional pasca-Pemilu 2024 menunjukkan posisi PDI Perjuangan yang cukup berseberangan dengan koalisi partai politik pendukung pemerintah, yaitu Koalisi Maju Plus (KIM Plus) (CNN Indonesia, 2025).

Selama ini, kajian mengenai fenomena calon tunggal cenderung membedah isu tersebut murni dari akses perilaku pemilih, anomali perlawanan kotak kosong (Hadi Kusuma & Akhtar, 2024), atau merujuk pada kuatnya cengkeraman kartelisasi elite di tingkat lokal (Fernando Holqi et al., 2025). Mayoritas literatur menempatkan partai politik secara seragam sebagai aktor pragmatis yang selalu cenderung melebur ke dalam koalisi gemuk guna mengamankan kekuasaan. Akibatnya, muncul sebuah kesenjangan literatur (*research gap*) yang signifikan: sangat jarang ditemukan studi yang menawarkan perspektif holistik mengenai rasionalitas kalkulasi partai minoritas yang berani menolak arus hegemoni dan nekat maju sebagai penantang tunggal.

Kesenjangan akademik inilah yang menemukan relevansinya pada kasus PDI Perjuangan di Kabupaten Bogor. Klaim normatif mengenai upaya penyelamatan demokrasi di wilayah tersebut patut diuji secara kritis, terutama apabila dikomparasikan dengan pola manuver partai ini pada kontestasi Pilkada Serentak 2024 di berbagai daerah lainnya. Alih-alih menampilkan konsistensi pada garis perlawanan ideologis, institusi kepartaian ini di sejumlah wilayah justru merepresentasikan pragmatisme politik dengan berafiliasi ke dalam koalisi partai pendukung pemerintah (KIM Plus). Bahkan, di beberapa daerah, partai ini turut berpartisipasi aktif dalam pembentukan koalisi raksasa (*grand coalition*) yang secara efektif mengeliminasi kontestasi publik dan melahirkan fenomena calon tunggal.

Variasi spasial dan inkonsistensi sikap politik tersebut secara teoretis menggugurkan asumsi bahwa manuver PDI Perjuangan di Kabupaten Bogor didorong secara absolut oleh determinisme ideologis. Sebaliknya, kontradiksi empiris ini justru menghadirkan urgensi berupa teka-teki penelitian (*research puzzle*) yang krusial untuk diinvestigasi: apabila tidak berlandaskan pada puritanisme ideologi semata, kalkulasi rasional dan kompensasi politik (*side-payments*) seperti apa yang secara substansial menjadi target PDI Perjuangan, sehingga partai ini bersedia mengartikulasikan manuver penantang tunggal yang secara probabilitas elektoral merepresentasikan sebuah anomali dan kerugian strategis?

Berangkat dari urgensi dan teka-teki empiris tersebut, penelitian ini bertujuan untuk membongkar rasionalitas serta motif politik di balik manuver PDI Perjuangan sebagai penantang tunggal pada Pilkada Kabupaten Bogor 2024. Melalui komparasi lensa teori koalisi politik dan konsep kontestasi dalam poliarki, studi ini diharapkan dapat melengkapi ruang

kosong pada literatur ilmu politik, khususnya dalam kajian dinamika elektoral daerah. Pada tataran praksis, temuan penelitian ini dirancang untuk mampu menjembatani dikotomi antara idealisme penyelamatan sistem demokrasi dan pragmatisme kalkulasi koalisi. Dengan demikian, kajian ini akan memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai strategi mempertahankan eksistensi oposisi di tengah ekosistem politik lokal yang semakin terhegemoni oleh kartelisasi elite.

B. TINJAUAN PUSTAKA

1. Pilkada Sebagai Bentuk Berjalannya Demokrasi Lokal

Dalam kerangka teori demokrasi, Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) bukan sekadar prosedur administratif, melainkan panggung utama bagi berjalannya demokrasi lokal. Merujuk pada konsep *Polyarchy* (Poliarki) yang dikemukakan oleh Dahl (1971), sebuah rezim atau sistem politik di tingkat lokal hanya dapat dikatakan demokratis jika memenuhi dua dimensi mutlak: Inklusivitas (partisipasi massa secara luas) dan Kontestasi Publik (adanya ruang kompetisi dan oposisi) (Santoso Muharam et al., 2023). Pilkada merupakan manifestasi langsung dari kedua dimensi tersebut, di mana rakyat berhak berpartisipasi untuk memilih, dan elite politik memiliki ruang yang setara untuk saling berkontestasi menawarkan alternatif kepemimpinan.

Demokrasi yang sehat pada hakikatnya mensyaratkan adanya demokrasi substantif, bukan sekadar formalitas prosedural (Syam et al., 2026). Dalam iklim demokrasi substantif, kompetisi politik berfungsi sebagai arena pertukaran gagasan yang dinamis dan menjamin sirkulasi elite secara adil (Syam et al., 2026). Tanpa ketersediaan pilihan alternatif kandidat yang kredibel, Pilkada berisiko terdegradasi menjadi sekadar “simulasi demokrasi” (*simulacrum of democracy*) di mana pemilihan tetap berjalan secara legal namun kehilangan fungsi selektif dan deliberatifnya. Kebebasan memilih yang menjadi pilar utama demokrasi pun menjadi terdistorsi apabila rakyat tidak disuguhkan pilihan yang setara secara institusional (Syam et al., 2026).

2. Fenomena Calon Tunggal Dan Urgensi Oposisi Politik

Secara konseptual, fenomena calon tunggal dalam Pilkada merupakan bentuk anomali dari sistem demokrasi multipartai yang umumnya disebabkan oleh pragmatisme politik dan kartelisasi elite. Fenomena ini terjadi ketika mayoritas partai politik memborong rekomendasi pencalonan (*ticket-buying*) untuk satu kandidat kuat demi mengamankan posisi dalam gerbong kekuasaan, sehingga menutup ruang bagi munculnya kandidat alternatif. Praktik kartelisasi politik ini sangat merusak karena membuat partai politik beralih fungsi; dari yang seharusnya menjadi institusi penyambung aspirasi rakyat, merosot menjadi sekadar alat legitimasi bagi elite yang dominan (Syam et al., 2026). Fenomena ini juga menjadi cerminan nyata atas kegagalan fungsi rekrutmen dan kaderisasi partai politik, serta tingginya biaya politik (*political dowry*) di tingkat lokal (Santoso Muharam et al., 2023).

Akibatnya, pemilih dihadapkan pada pilihan semu, yakni kandidat tunggal melawan kotak kosong. Keberadaan kotak kosong pada surat suara mulanya difasilitasi oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 100/PUU-XIII/2015 sebagai jalan keluar untuk mencegah matinya hak pilih konstitusional warga negara ketika terjadi jalan buntu pencalonan (Santoso Muharam et al., 2023). Namun, dalam perkembangannya, kotak kosong bertransformasi menjadi representasi krisis kepercayaan publik terhadap institusi politik dan instrumen protes terhadap kandidat yang dianggap tidak mewakili keragaman masyarakat (Hadi Kusuma & Akhtar, 2024). Hegemoni ini semakin diperparah oleh intervensi *power elite* (elite kekuasaan), yakni kelompok kecil pemegang kendali di tingkat atas yang kerap mendikte arah koalisi dari belakang layar, sehingga masyarakat kelas bawah hanya menjadi objek elektoral tanpa ruang partisipasi yang otentik (Fernando Holqi et al., 2025).

3. Rasionalitas Manuver Politik Dalam Dinamika Elektoral

William H. Riker (1962) dalam karyanya, *The Theory of Political Coalitions*, mengemukakan sebuah dalil fundamental yang dikenal sebagai Prinsip Ukuran (*Size Principle*). Prinsip ini menyatakan bahwa dalam situasi politik yang kompetitif, aktor-aktor rasional akan cenderung membentuk koalisi pemenang minimum (*minimum winning coalition*). Tujuannya adalah untuk memastikan kemenangan dengan jumlah anggota sesedikit mungkin, sehingga “kemenangan” atau *payoff* (baik dalam bentuk jabatan, kebijakan, maupun sumber daya) yang diperoleh dapat didistribusikan secara maksimal kepada setiap anggota koalisi. Dalam kerangka Riker, tujuan utama dari seorang “manusia politik yang rasional adalah untuk menang” (*win*), bukan sekadar berpartisipasi.

Namun, dinamika Pilkada dengan fenomena calon tunggal sering kali memperlihatkan penyimpangan mutlak dari Prinsip Ukuran ini. Pembentukan koalisi raksasa (*oversized coalition*) merupakan bentuk inefisiensi elektoral yang didorong oleh kepanikan pragmatis untuk meminimalkan risiko kekalahan, bukan karena adanya kesamaan platform ideologis antarpartai (Fernando Holqi et al., 2025; Hadi Kusuma & Akhtar, 2024). Koalisi raksasa ini secara sengaja menciptakan oligarki elektoral yang mengeliminasi ruang kompetisi (Syam et al., 2026).

Di sisi lain, dalam konteks Pilkada Kabupaten Bogor 2024, manuver PDI Perjuangan yang memilih berhadapan sendirian melawan koalisi gemuk secara terang-terangan menafikan tujuan utama untuk menang secara matematis. Meski tampak irasional dalam kacamata Rikerian yang sempit, manuver sebagai penantang tunggal ini memiliki landasan rasionalitas tersendiri jika diukur melalui *side-payments* (kompensasi sampingan) jangka panjang. Dengan mengambil ruang kosong di luar kartel, partai penantang berkesempatan untuk mewedahi suara-suara kelompok masyarakat yang kecewa dan terpinggirkan oleh dominasi koalisi raksasa (Hadi Kusuma & Akhtar, 2024), sekaligus menancapkan pijakan moral sebagai satu-satunya entitas yang menjaga keberlangsungan demokrasi lokal.

C. METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus intrinsik guna memahami secara holistik dinamika dan rasionalitas di balik manuver PDI Perjuangan sebagai penantang tunggal pada Pilkada Kabupaten Bogor 2024. Dalam hal ini, peneliti bertindak sebagai instrumen utama yang menggali data primer murni melalui wawancara mendalam semi-terstruktur bersama satu informan kunci yang dipilih secara purposif, yakni Bayu Syahjohan, selaku Ketua DPC sekaligus calon bupati yang merepresentasikan aktor sentral dan pengambil keputusan utama. Teknik tersebut diandalkan untuk membongkar kalkulasi tak kasat mata, seperti motif pencarian *side-payments* elektoral, yang kemudian dilengkapi, divalidasi, dan dikontekstualisasikan melalui pengumpulan data sekunder secara ekstensif berupa studi literatur terhadap dokumen resmi KPU, rekam jejak pemberitaan media, arsip KPUD Kabupaten Bogor, serta jurnal-jurnal ilmiah yang berkaitan dengan analisis fenomena calon tunggal. Selanjutnya, dalam pemrosesan data, penelitian ini menerapkan model analisis interaktif yang beroperasi secara simultan dan siklikal melalui tiga alur kegiatan utama, yakni kondensasi data (*data condensation*), penyajian data (*data display*), dan penarikan kesimpulan (*conclusion drawing*) (Miles, Huberman, dan Saldaña, 2014 dalam Fiantika & dkk., 2022). Melalui tahapan analisis yang bersifat induktif ini, informasi mendalam yang digali dari aktor pembuat keputusan disandingkan dan dibedah secara langsung menggunakan kacamata teori koalisi rasional Riker (1962) dan asas demokrasi Dahl (1971), sehingga mampu menghasilkan eksplanasi yang komprehensif mengenai rasionalitas di balik upaya pencegahan calon tunggal.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Konfigurasi Politik dalam Pilkada Kabupaten Bogor 2024

Pilkada Kabupaten Bogor 2024 mencerminkan konfigurasi kekuatan politik lokal yang cenderung timpang dan didominasi oleh poros koalisi besar. Jika menilik tren elektoral beberapa periode ke belakang, Kabupaten Bogor sebelumnya merupakan basis kekuatan politik Islam yang cukup kuat, ditandai dengan dominasi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang berhasil memenangkan tiga periode berturut-turut dalam pemilihan kepala daerah (S, 2024). Namun, dalam beberapa tahun terakhir, pengaruh politik PPP mengalami pelemahan, seiring dengan penurunan performa elektoral partai tersebut di tingkat nasional. Kekosongan dominasi tersebut kemudian dimanfaatkan oleh partai-partai politik lain yang memiliki kekuatan struktural dan sumber daya lebih besar, seperti Partai Golongan Karya (Golkar) dan Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), yang mulai memosisikan diri sebagai kekuatan utama elektoral.

Pada fase awal pra-pencalonan, konfigurasi politik sebenarnya sempat mengarah pada pembentukan poros alternatif yang kompetitif. Nama Ade Ruhandi (Jaro Ade), yang sebelumnya menempati posisi kedua pada Pilkada 2018, kembali diusung oleh Partai Golkar sebagai bakal calon bupati. Saat itu, PDI Perjuangan dan Partai Golkar telah merajut kesepakatan strategis untuk mengusung Jaro Ade yang diproyeksikan berpasangan dengan Musyafaurrahman sebagai representasi PDI Perjuangan (Hutajulu, 2024). Keseriusan konsolidasi ini tidak sekadar berada pada tataran wacana, melainkan telah mencapai eskalasi tingkat tinggi yang dibuktikan melalui pertemuan langsung antara Jaro Ade dengan figur-figur sentral PDI Perjuangan tingkat nasional, yakni Sekretaris Jenderal Partai dan Adian Napitupulu (lihat Gambar 1).



Gambar 1 Pertemuan Sekjen PDI Perjuangan, Adian Napitupulu, Musyafaurrahman, dan Ade Ruhandi (Golkar)

Sumber: DetikNews

Kematangan rencana koalisi awal ini dikonfirmasi langsung oleh Bayu Syahjohan selaku Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Bogor, yang menyatakan:

“Awalnya ini juga sebenarnya sudah ada pasangan yang direkomendasikan oleh Ketua Umum dan Sekjen (DPP PDIP)... Setelah diumumkan, rekomendasi sudah keluar atas nama salah satu kader kita untuk calon wakil bupati, lalu calon bupatinya adalah salah satu kader dari Golkar, mantan Ketua DPD Golkar yang cukup ternama di kawasan Golkar. Ya, sebenarnya kita berharap bersama dengan calon dari kita... yang siap pada saat itu Pak Mus (Musyafaurrahman), itu adalah kadernya Pak Adian.”

Namun, embrio koalisi strategis yang telah terkonsolidasi tersebut kandas seketika menyusul adanya intervensi dari elite nasional yang berafiliasi dengan pusat kekuasaan. Di sisi lain, Partai Gerindra yang memiliki posisi strategis secara nasional memutuskan untuk menugaskan Rudy Susmanto, Ketua DPRD Kabupaten Bogor, menyingkirkan Iwan Setiawan selaku petahana. Keputusan ini rasional mengingat nama Rudy Susmanto semakin populer berkat perannya dalam mengamankan suara kemenangan Prabowo Subianto di Kabupaten Bogor pada Pemilu Presiden 2024. Instruksi vertikal dari elite nasional kemudian mendesak Partai Golkar untuk melakukan manuver putar balik (*U-turn*) secara mendadak, meninggalkan kesepakatan awal demi bergabung ke dalam gerbong koalisi bersama Partai Gerindra. Terkait momen krusial pembatalan sepihak yang membajak kesepakatan tersebut, Bayu menuturkan:

“Setelah keluar rekomendasi, ada sesuatu hambatan yang ternyata... Dia (calon dari Golkar) tidak ke kita, tapi dia ke KIM Plus (koalisi pemerintah) jadi pasangan dari lawan saya waktu itu dari Gerindra. Nah, setelah itu tentunya kita merapatkan barisan DPP, DPD, dan DPC untuk (menentukan) siapa yang akan maju, itu sudah ditawarkan ke beberapa rekan-rekan kami Pengurus Dewan Pimpinan Cabang, tetapi tidak ada yang siap.”

Kombinasi antara Partai Golkar dan Gerindra, yang kemudian diikuti oleh dukungan dari 15 partai politik lainnya, secara definitif membentuk satu poros "koalisi gemuk" yang mengusung pasangan Rudy Susmanto dan Jaro Ade. Dalam perspektif teori koalisi Riker (1962), intervensi dari elite nasional ini beroperasi sebagai variabel eksternal (efek informasi) yang merombak total kalkulasi rasionalitas aktor politik daerah. Partai-partai pada akhirnya dipaksa mengabaikan skenario *minimum winning coalition* yang sebelumnya tengah dirajut, dan terpaksa bermigrasi ke dalam *grand coalition* akibat ketakutan terhadap sanksi politik pusat. Kekuatan koalisi ini sangat hegemonik karena menggabungkan modal simbolik kedekatan elite nasional milik Rudy Susmanto dan basis massa lokal yang kuat dari Jaro Ade. Dalam terminologi Dahl (1971), situasi ini adalah sebuah pergeseran ekstrem dari arena kompetitif menuju hegemoni, di mana partisipasi publik mungkin tetap ada, namun ruang untuk oposisi dan kontestasi publik (*public contestation*) yang efektif nyaris tertutup sepenuhnya.

Di tengah konstelasi yang sangat tidak seimbang ini, hanya satu partai yang berada di luar koalisi raksasa tersebut, yaitu PDI Perjuangan. Dengan hanya bermodalkan 5 kursi (9%) di DPRD, PDI Perjuangan berada dalam posisi yang sangat marjinal. Secara kalkulasi politik konvensional, pilihan yang paling rasional adalah bergabung dengan koalisi pemenang untuk mendapatkan sebagian kecil kue kekuasaan, atau tidak ikut serta sama sekali untuk menghindari kekalahan yang memalukan. Namun, PDI Perjuangan mengambil jalan yang berbeda dengan memutuskan maju sendiri mengusung pasangan Bayu Syahjohan dan Musyafaurahman. Manuver di menit akhir ini menempatkan mereka sebagai satu-satunya penantang bagi hegemoni koalisi 17 partai (Susianti, 2024), sekaligus menjadi titik tolak bagi keberlangsungan Pilkada Kabupaten Bogor agar tetap berjalan secara kompetitif.

Tabel 1 Komparasi Kekuatan Elektoral dan Dukungan Partai pada Pilkada Kabupaten Bogor 2024

No.	Indikator	Pasangan Rudy Susmanto - Ade Ruhandi	Pasangan Bayu Syahjohan - Musyafaurahman
1	Partai pengusung	17 partai politik	PDI Perjuangan
2	Jumlah Kursi di DPRD Kab. Bogor	50 kursi	5 kursi
3	Perolehan suara	1.559.328	599.453
4	Status	Pemenang	Kalah

Sumber: Diolah dari data KPU

2. Manuver Politik PDI Perjuangan

Keputusan PDI Perjuangan untuk maju secara soliter pada Pilkada Kabupaten Bogor 2024 dapat dibedah melalui dua lensa utama yang tampak bertentangan: sebagai komitmen normatif terhadap nilai demokrasi, atau sebagai kalkulasi strategis rasional yang memicu anomali. Secara eksplisit, narasi yang dibangun oleh PDI Perjuangan menitikberatkan pada komitmen normatif penyelamatan demokrasi. Keputusan ini sejatinya lahir dari krisis ketersediaan kader yang bersedia maju melawan hegemoni koalisi raksasa, sehingga memunculkan mandat partai yang tidak dapat ditolak oleh pimpinan di tingkat daerah. Terkait dinamika internal yang berujung pada manuver tersebut, Bayu Syahjohan selaku Ketua DPC PDI Perjuangan menjelaskan:

“Ya, pertama awalnya saya itu tidak ingin mencalonkan diri... pada dasarnya adalah menjaga marwah atau martabat partai... sudah ditawarkan ke beberapa rekan-rekan kami Pengurus Dewan Pimpinan Cabang, tetapi tidak ada yang siap. Bahkan waktu itu ditawarkan untuk didanai, ya belum ada yang siap. Akhirnya pada saat itu DPP PDI Perjuangan yang diwakili oleh Pak Adian Napitupulu itu juga meminta saya, nah saya bilang kalau ini tugas partai saya sanggupin.”

Dari kacamata normatif, tindakan PDI Perjuangan ini selaras dan dapat dibingkai secara sempurna menggunakan teori Poliarki dari Dahl (1971). Dahl mengidentifikasi bahwa demokratisasi mutlak membutuhkan dua dimensi fundamental: inklusivitas (hak partisipasi massa) dan kontestasi publik (*public contestation*), yakni ketersediaan ruang kompetisi yang adil bagi oposisi. Tanpa adanya kontestasi, sebuah rezim yang menyelenggarakan pemilu hanya akan terdegradasi menjadi "hegemoni inklusif", di mana hak pilih universal beralih fungsi sekadar menjadi ritual pengesahan kekuasaan tanpa makna kompetitif. Dengan mengusung pasangan calon penantang tunggal, PDI Perjuangan secara *de facto* telah memblokir skenario calon tunggal melawan kotak kosong, sekaligus menyelamatkan pilar kontestasi publik di Kabupaten Bogor. Dengan mengusung pasangan calon penantang tunggal, PDI Perjuangan secara *de facto* telah memblokir skenario calon tunggal melawan kotak kosong, sekaligus menyelamatkan pilar kontestasi publik di Kabupaten Bogor. Langkah perlawanan ini dikonkretkan secara institusional melalui pendaftaran resmi pasangan Bayu Syahjohan dan Musyafaurahman ke KPUD Kabupaten Bogor pada detik-detik terakhir penutupan batas waktu pendaftaran.



Gambar 2 Momen Pendaftaran Pasangan Bayu Syahjohan dan Musyafaurahman di KPUD Kabupaten Bogor pada Hari Terakhir Masa Pendaftaran

Sumber: ANTARA FOTO/Yulius Satria Wijaya/tom

Eksekusi manuver di menit akhir ini menjadi bukti absolut bahwa partisipasi mereka bukanlah wacana kosong, melainkan intervensi prosedural yang sah untuk memastikan ruang kompetisi tetap terbuka bagi masyarakat. Manuver heroik penyelamatan demokrasi ini nyatanya menciptakan resonansi yang terfragmentasi di masyarakat. Bayu Syahjohan menyadari bahwa narasi penyelamatan demokrasi tidak sepenuhnya bergema di kalangan masyarakat akar rumput yang cenderung pragmatis, namun pesan simbolik tersebut berhasil mengakuisisi dukungan dari kelompok sipil terpelajar:

“Sebenarnya sebagian kecil saja yang mengerti dan melek politik ya, artinya demokrasi harus berjalan dengan baik di Kabupaten Bogor, sehingga saya mendapatkan banyak simpati dari kaum intelektual, akademisi, dan beberapa tokoh-tokoh masyarakat yang cukup besar di Kabupaten Bogor... Nah ini kan sebagian besar yang melek politik pasti dukung saya, dukung demokrasi.”

Namun demikian, apabila dievaluasi secara ketat menggunakan kerangka teori pilihan rasional (*rational choice*), khususnya *The Theory of Political Coalitions* dari Riker (1962), manuver PDI Perjuangan tersebut justru merepresentasikan sebuah anomali yang irasional. Riker merumuskan *Size Principle*, di mana aktor politik rasional akan selalu berupaya membentuk koalisi pemenang minimum (*minimum winning coalition*). Tujuannya adalah untuk menang dengan melibatkan sesedikit mungkin anggota, sehingga kompensasi kemenangan (*payoff*) dapat didistribusikan secara maksimal. Dalam konteks Pilkada Kabupaten Bogor 2024, prinsip rasionalitas Riker ini secara terang-terangan dilanggar oleh dinamika kedua kubu: Pertama, koalisi ini merupakan manifestasi ekstrem dari koalisi gemuk (*oversized coalition*). Dari sudut pandang Riker, pembentukan koalisi ini sangat tidak efisien karena *payoff* dari kemenangan kelak harus dibagi kepada terlalu banyak aktor politik. Motivasi utama mereka bukanlah efisiensi pembagian kekuasaan, melainkan kepanikan dan strategi "sapu bersih" untuk menutup seluruh celah munculnya lawan. Kedua, keputusan maju sendirian dengan dukungan parlemen yang hanya sebesar 9% secara matematis menafikan tujuan utama dalam teori permainan Riker, yakni "keharusan untuk menang". PDI Perjuangan secara sadar terjun ke dalam medan pertempuran dengan probabilitas kemenangan yang mendekati nol. Hal ini terkonfirmasi pada hasil akhir Pilkada, di mana pasangan Rudy-Ade mendominasi dengan 1.559.328 suara (72,23%), sementara pasangan Bayu-Musya memperoleh 599.453 suara (27,77%) (Komisi Pemilihan Umum, 2024).

Dari perspektif Rikerian yang sempit di mana *payoff* diukur semata-mata dari pencapaian kemenangan matematis hari ini, tindakan PDI Perjuangan adalah sebuah manuver irasional karena mengorbankan sumber daya yang masif untuk sebuah pertarungan yang mustahil dimenangkan. Stigma ketidakrasionalan ini bahkan memunculkan tudingan di tengah masyarakat bahwa PDI Perjuangan hanyalah “calon boneka”. Namun, Bayu membantah keras pragmatisme tersebut dan menegaskan totalitas perlawanan mereka:

"Saya nggak ambil pusing lah tentang kritik-kritik masyarakat. Oh ini pasangan dadakan, bahkan ada yang mau fitnah bahwa sengaja dipasang terus mendapatkan bayaran untuk seperti berjalannya demokrasi. Padahal enggak, kita fight betul-betul fight. Nggak ada sama sekali kita ada permainan lah gitu ya."

Kebuntuan dalam menganalisis “ketidakrasionalan” elektoral inilah yang pada akhirnya menuntut pembuktian lebih lanjut. Jika kemenangan matematis bukanlah tujuan utamanya, maka rasionalitas PDI Perjuangan harus diukur melalui kompensasi tak kasat mata atau *side-payments* jangka panjang yang mereka akuisisi dari manuver penantang tunggal tersebut.

3. Akuisisi Informasi dan Modal Politik Masa Depan

Dalam kacamata teori permainan dan koalisi rasional, kemenangan tidak selalu diartikan secara biner sebagai perolehan instan atas jabatan eksekutif dalam satu siklus pemilu. William H. Riker (1962) mengonseptualisasikan adanya *side-payments* (pembayaran atau

kompensasi sampingan) yang dapat diakuisisi oleh aktor politik di luar dari *payoff* utama. Manuver PDI Perjuangan di Kabupaten Bogor bertransformasi dari sebuah anomali menjadi sebuah tindakan yang sangat rasional apabila kita mengidentifikasi bahwa target utama mereka bukanlah kemenangan matematis pada tahun 2024, melainkan serangkaian *side-payments* strategis untuk investasi politik jangka panjang.

Berdasarkan analisis silang antara kerangka teoretis dan temuan lapangan, perlawanan PDI Perjuangan menghasilkan empat pilar kompensasi strategis utama: *Payoff* pertama yang diakuisisi adalah penguatan citra partai di tengah lanskap politik yang sangat transaksional. Dengan menolak bergabung ke dalam koalisi raksasa pragmatis, PDI Perjuangan berhasil memosisikan diri sebagai satu-satunya institusi penjaga gerbang demokrasi. Keputusan ini didasari oleh prinsip untuk menjaga marwah atau martabat partai sebagai entitas ideologis. Marwah ini, meskipun tidak berwujud material, merupakan aset politik yang sangat esensial untuk mengunci loyalitas kader. Lebih jauh, perlawanan ini terbukti menghasilkan simpati organik yang terukur, khususnya dari segmen pemilih terdidik. Bayu Syahjohan mengonfirmasi keberhasilan akuisisi modal simbolik ini:

“Jadi begini, saya nih kan berinteraksi dengan se-Kabupaten Bogor. Artinya pada saat kemarin, saya banyak menemukan orang-orang yang sudah meleak betul bahwa PDI Perjuangan berjuang adalah yang berideologi Pancasila Satu Juni. (Mereka) melihat bahwa betul-betul berjuang buat masyarakat, sehingga saya sudah akan mengukur kepentingan jangka panjangnya.”

Manuver untuk tetap berdiri sebagai penantang justru membuka celah bagi PDI Perjuangan untuk menyerap kelompok-kelompok yang termarginalkan oleh koalisi raksasa. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa hegemoni 17 partai tersebut tidak sepenuhnya solid. Langkah berani PDI Perjuangan berhasil menarik dukungan dari 7 partai politik non-parlemen yang awalnya berada di kubu lawan. Kelompok partai ini merasa kecewa dengan komitmen koalisi besar tersebut dan akhirnya menandatangani nota kesepahaman (MoU) untuk secara definitif beralih menjadi tim sukses PDI Perjuangan. Hal ini membuktikan bahwa sikap sebagai oposisi tunggal berfungsi efektif sebagai magnet bagi faksi-faksi politik yang terdisrupsi oleh kartelisasi.

Kompensasi paling konkret dan terukur dari manuver ini adalah perolehan data kekuatan murni. Dalam kerangka Riker, informasi merupakan instrumen krusial untuk menekan tingkat ketidakpastian (*imperfect information*). Dengan tetap bertarung, PDI Perjuangan berhasil melakukan pemetaan demografis dan uji kelayakan mesin partai secara *real-time*. Hasil pencapaian elektoral yang menembus angka 27,77% (599.453 suara) ternyata jauh melampaui ekspektasi internal partai. PDI Perjuangan mengidentifikasi bahwa perolehan suara pasangan calon bupati ini melonjak hampir tiga kali lipat jika dikomparasikan dengan perolehan suara legislatif partai tersebut pada periode yang sama.

Selain itu, lonjakan ini juga terlihat sangat ekstrem apabila dikomparasikan secara langsung dengan rekam jejak elektoral Bayu Syahjohan pada kontestasi Pilkada sebelumnya. Sebagaimana direpresentasikan pada Tabel 1, perolehan suara Bayu Syahjohan mengalami eskalasi lebih dari tiga kali lipat pada Pilkada 2024 ketika ia berani bermanuver maju sebagai penantang tunggal.

Tabel 2 Komparasi Perolehan Suara Kandidat PDI Perjuangan pada Pilkada Kabupaten Bogor (2018 vs 2024)

Tahun	Pasangan Calon dari PDI Perjuangan	Perolehan Suara
2018	H. Fitri Putra Nugraha, S.Sos dan H. R. Bayu Syahjohan	177.153 suara
2024	H. R. Bayu Syahjohan dan Musyafaurrahman	599.453 suara

Sumber: Diolah dari data (KPU Kabupaten Bogor, 2018, 2024)

Lonjakan elektoral yang terangkum dalam Tabel 1 tersebut secara definitif dikalkulasikan sebagai bentuk keberhasilan investasi jangka panjang. Fakta bahwa mereka mampu meraih hampir 600 ribu suara di tengah gempuran 17 partai dan masifnya budaya pragmatisme membuktikan adanya konsolidasi basis massa baru. Hal ini dikonfirmasi langsung oleh Bayu Syahjohan:

“Alhamdulillah mendapatkan suara hampir 3 kali lipat daripada perolehan di legislatif kemaren. Ini menjadi satu modal yang harus kita maintenance ke depannya di 2029 kita harus bisa menjadi pemenang bahkan ditambah lagi begitu... Orang yang mendukung kita pada saat kemarin di Pilkada juga menjadi satu bagian keluarga yang tidak terpisahkan.”

Pembahasan mengenai rasionalitas manuver ini tidak dapat dilepaskan dari kompleksitas sosio-politik Kabupaten Bogor. Melalui kontestasi ini, PDI Perjuangan secara langsung mengidentifikasi hambatan struktural berupa tingginya biaya politik (*high-cost politics*) dan budaya patronase-klientelisme. Bayu Syahjohan menyoroti betapa kuatnya cengkeraman pragmatisme pemilih di mana pertarungan gagasan hancur seketika oleh praktik politik uang (serangan fajar). Kondisi ini diperparah oleh asimetri logistik yang ekstrem; di mana kubu lawan diduga kuat mendayagunakan kekuatan kapital yang masif, sementara kandidat PDI Perjuangan harus membiayai operasional kampanye di 40 kecamatan secara mandiri dengan hanya mengandalkan bantuan Alat Peraga Kampanye (APK) dari pusat. Akuisisi informasi mengenai realitas pragmatisme ini menyadarkan partai bahwa agenda pendidikan politik bagi masyarakat harus menjadi fokus utama selama lima tahun ke depan.

Tabel 3 Analisis Payoff (Kompensasi Strategis) Jangka Panjang dari Manuver PDI Perjuangan

No.	Type <i>Payoff</i> (Keuntungan Strategis)	Deskripsi dan Bukti
1	Modal Simbolik	Membangun citra sebagai “penjaga demokrasi” dan partai berprinsip. Mendapat apresiasi dari kalangan terpelajar dan aktivis, yang memperkuat “marwah partai”.
2	Modal Politik & Informasi	Memperoleh data kekuatan riil (27,77% suara) sebagai basis pemetaan untuk Pilkada selanjutnya. Menguji soliditas dan efektivitas mesin partai.
3	Modal Organisasi & Ideologi	Menjaga soliditas internal dengan tidak berkompromi dalam koalisi pragmatis. Menegaskan identitas sebagai satu-satunya kekuatan oposisi yang kredibel di Kabupaten Bogor.
4	Modal Evaluasi Sosio-Politik	Mengakuisisi temuan faktual mengenai tingkat pragmatisme dan darurat <i>high-cost politics</i> di akar rumput sebagai landasan agenda edukasi pemilih ke depan.

Sumber: sintesis peneliti berdasarkan hasil wawancara dan studi literatur

E. KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa manuver politik PDI Perjuangan pada Pilkada Kabupaten Bogor 2024 bukanlah sebuah anomali elektoral yang irasional, melainkan representasi dari strategi rasionalitas tingkat tinggi yang beroperasi pada proyeksi jangka panjang (*long game*). Keputusan untuk menolak tunduk pada kartelisasi 17 partai dan nekat maju sebagai penantang tunggal membuktikan bahwa probabilitas kekalahan matematis telah dikalkulasi sebagai harga yang sepadan untuk mengakuisisi empat kompensasi strategis (*side-payments*). Keempat kompensasi tersebut meliputi: (1) Modal Simbolik dan Citra Ideologis

dengan memblokir skenario calon tunggal dan menjadi benteng demokrasi lokal; (2) Modal Organisasi dan Soliditas Aliansi dengan menjaga kemurnian oposisi yang sukses menarik faksi partai non-parlemen; (3) Modal Politik dan Informasi Elektoral melalui perolehan 27,77% (599.453 suara) guna mereduksi ketidakpastian sebagai basis kontestasi 2029; serta (4) Modal Evaluasi Sosio-Politik berupa perolehan data faktual mengenai darurat pragmatisme (*high-cost politics*) di akar rumput. Dengan memadukan teori koalisi rasional Riker dan konsep poliarki Dahl, partai ini terbukti secara sadar mentransformasikan medan kekalahan jangka pendek menjadi arena investasi politik masa depan.

Pada tataran teoretis, penelitian ini memberikan kontribusi dengan membuktikan bahwa idealisme normatif Dahl dalam menyelamatkan kontestasi publik dapat beroperasi secara komplementer dengan kalkulasi rasional Riker mengenai *side-payments*. Tindakan yang secara sekilas tampak sebagai heroisme buta, nyatanya dapat dibingkai sebagai sebuah kalkulasi rasional yang sangat mutakhir. Secara empiris, kasus ini menghadirkan preseden penting mengenai taktik perlawanan terhadap praktik oligarki elektoral dan "borong partai" yang mengancam demokrasi lokal di Indonesia. Manuver PDI Perjuangan di Kabupaten Bogor menegaskan sebuah tesis esensial: di tengah ekosistem politik yang terhegemoni secara absolut, sebuah kekalahan yang terencana untuk menjaga marwah jauh lebih bernilai secara strategis dibandingkan kemenangan semu yang dilumpuhkan oleh kompromi.

DAFTAR PUSTAKA

- CNN Indonesia. (2024). *Berapa Daerah yang Menggelar Pilkada Serentak 27 November 2024?*. Diakses dari: <https://www.cnnindonesia.com/edukasi/20240424150723-561-1089978/berapa-daerah-yang-menggelar-pilkada-serentak-27-november-2024>
- CNN Indonesia. (2025). *PDIP soal Koalisi Permanen: Biarlah Kami Menempuh Jalan yang Sepi*. Diakses dari: <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20250218071719-32-1199410/pdip-soal-koalisi-permanen-biarlah-kami-menempuh-jalan-yang-sepi>
- Dahl, R. A. (1971). *POLYARCHY Participation and Opposition*. Yale University Press.
- Faturahman, A. A. (2024). *Terkepung Koalisi Gemuk di Pilkada 2024*. Diakses dari: <https://www.tempo.co/politik/koalisi-gemuk-pilkada-2024-23586>
- Fiantika, F. R., Wasil, M., Jumiyati, S. R. I., Honesti, L., Wahyuni, S. R. I., Mouw, E., ... & Ambarwati, K. (2022). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Padang: Global Eksekutif Teknologi.
- Hamidah, H. (2024, December 12). *Daftar Pilkada 2024 yang Diikuti Paslon Tunggal dan yang Dimenangkan Kotak Kosong*. Diakses dari: <https://www.tempo.co/politik/daftar-pilkada-2024-yang-diikuti-paslon-tunggal-dan-yang-dimenangkan-kotak-kosong-1180306>
- Holqi, F. G. F., Handayani, F. F., Astuti, W. P., Permatasari, P. D., & Putra, R. A. R. (2025). Fenomena Calon Tunggal dan Arah Gerak Partai Politik Pada Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten/Kota 2024. *Jurnal Pemerintahan dan Politik*, 10(1), 110-130. <https://doi.org/10.36982/jpp.v10i1.5105>
- Hutajulu, M. A. (2024). *PDIP Ajak Golkar Kerja Sama Usung Jaro Ade-Kang Mus di Pilbup Bogor 2024*. Diakses dari: <https://news.detik.com/pemilu/d-7465569/pdip-ajak-golkar-kerja-sama-usung-jaro-ade-kang-mus-di-pilbup-bogor-2024>
- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bogor Nomor: 155 /PL.03.6-Kpt/3201/KPU-Kab/VII/2018 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bogor Tahun 2018.
- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bogor Nomor 4243 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bogor Tahun 2024.

- Kusuma, A. S. H., & Akhtar, I. (2024). Political Cartelization and the Empty Ballot Box Phenomenon in Regional Elections. *Jurnal Mengkaji Indonesia*, 3(2), 287–307. <https://doi.org/10.59066/jmi.v3i2.903>
- Mahkamah Konstitusi. (2015). *Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-XIII/2015*.
- Muhid, H. K. (2024, August 26). *Penyebab Munculnya Calon Tunggal Lawan Kotak Kosong di Pilkada*. Diakses dari: <https://www.tempo.co/politik/penyebab-munculnya-calon-tunggal-lawan-kotak-kosong-di-pilkada--15607>
- Mz, H. I. (2014). Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung Sebagai Momentum Strategis dalam Pengembangan Otonomi Daerah dan Demokrasi Lokal. *Jurnal Valid*, 11(2), 57–72.
- Riker, W. H. (1962). *The Theory of Political Coalitions*. Yale University Press.
- S, A. A. (2024). *3 Periode Selalu Menang di Pilbup Bogor, PPP Siap Ukir Sejarah Untuk Pasangan Rudy-Jaro*. Diakses dari: <https://bogor.suara.com/read/2024/10/13/163919/3-periode-selalu-menang-di-pilbup-bogor-ppp-siap-ukir-sejarah-untuk-pasangan-rudy-jaro?page=all>
- Santoso Muharam, R., Pradhanawati, A., Fitriyah, & Supratiwi. (2023). Single Candidate: A Setback to Indonesian Democracy? *Technium Social Sciences Journal*, 51, 261–269.
- Sarbaini. (2015). Demokratisasi dan Kebebasan Memilih Warga Negara Dalam Pemilihan Umum. *Jurnal Inovatif*, VIII(1).
- Setiawan, M. F. (2024). *PDI Perjuangan Lawan 17 Parpol pada Pilkada Kabupaten Bogor*. Diakses dari: <https://www.antaraneews.com/berita/4296343/pdi-perjuangan-lawan-17-parpol-pada-pilkada-kabupaten-bogor>
- Susianti, D. (2024). *Pilbup Bogor Dipastikan Diikuti 2 Paslon, PDIP Kembali Melaju Sendirian*. Diakses dari: <https://www.metrotvnews.com/read/NA0Cj5Mj-pilbup-bogor-dipastikan-diikuti-2-paslon-pdip-kembali-melaju-sendirian>
- Syam, C., Arsyad, A., & Kambo, G. A. (2026). The Dominance of Single Candidates and Its Implications for the Quality of Local Democracy: An Analysis of Competition, Political Participation, and the People's Freedom of Choice. *Architecture Image Studies*, 7(1), 1107–1114. <https://doi.org/10.62754/ais.v7i1.997>
- Tempo. (2024). *PDIP Klaim Selamatkan Demokrasi di Pilkada Kabupaten Bogor*. Diakses dari: <https://www.tempo.co/pemilu/pdip-klaim-selamatkan-demokrasi-di-pilkada-kabupaten-bogor-13385>